



Haedar Nashir menyerahkan cenderamata kepada Anwar Ibrahim.

SETELAH MEMILIKI UNIVERSITAS Muhammadiyah Dirikan Sekolah di Malaysia

JAKARTA (KR) - Setelah memiliki TK dan Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM), Muhammadiyah meminta izin PM Malaysia untuk mendirikan sekolah di Malaysia. Di samping mempunyai Muhammadiyah Australia Collage, Persyarikatan ingin membangun sekolah Muhammadiyah di Malaysia.

Setelah pertemuan dengan PM Malaysia di Jakarta, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pertemuan di Kuala Lumpur, untuk membahas kolaborasi, kerja sama dan komunikasi antara Muhammadiyah dengan Malaysia.

Hal tersebut dikemukakan Keta Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai bertemu PM Malaysia Dato Anwar Ibrahim di Kantor Menteng Jakarta, Senin (4/9) malam. Haedar didampingi pengurus PP Muhammadiyah di antaranya Sekretaris Umum PP Abdul Mu'ti dan salah seorang pengurus PP Anwar Abbas. Dalam kesempatan itu Haedar menyampaikan tahniah Hari Kemerdekaan Malaysia 30 Agustus lalu.

Haedar juga berterima kasih karena sudah diberikan izin mendirikan perguruan tinggi di Malaysia. Diakui, Muhammadiyah tidak memungkiri per-

an Sri Anwar Ibrahim atas terbitnya izin pendirian UMAM di Malaysia. Bahkan peran Anwar Ibrahim atas UMAM sejak sebelum menjadi Perdana Menteri Malaysia.

Muhammadiyah ungkap Haedar, diharapkan Yang Mulia Dato Anwar Ibrahim, menjadi katalisator dan mengambil prakarsa, menyatukan membangun kolaborasi kaum muda Indonesia dan Malaysia. Untuk peran dunia Islam, sebut Haedar, memerlukan kebersamaan dengan negara-negara muslim dan Malaysia secara bertahap.

Ikatan baik yang terbangun antara Muhammadiyah dengan Dato Sri Anwar Ibrahim, kata Haedar, sudah sejak lama. Sebelum menjadi PM Malaysia, Anwar Ibrahim merupakan aktivis pergerakan Islam yang akrab dengan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya.

Berangkat dari kedekatan sejarah dan pemikiran, Haedar berharap ke depan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia bisa saling mendukung untuk *back-up* peran dan movement dari kaum muslim Indonesia-Malaysia agar tumbuh jadi kekuatan elaboratif, kolaboratif dan kohesif. **(Fsy)-d**

TIGA PENYAKIT BANSOS DIPERBAIKI

Pembaruan Data Dilakukan Tiap Bulan

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun, serangkaian perbaikan tersebut juga belum menciptakan sistem yang sempurna.

"Selama ini disebut penyakit bansos satu orangnya fiktif, dua orang miskin enggak dapat tiga orang kaya malah dapat, nah itu selalu penyakitnya DTKS," kata Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Menurut Pahala, serangkaian perbaikan DTKS sudah dilakukan sejak 2020. Awalnya sebanyak 99 juta data orang miskin dalam DTKS hanya 44 persen yang sinkron dengan data Nomor Induk Kependudukan.

"Jadi waktu itu awal pandemi Covid-19, orang yang diberi (bansos) kadang sudah meninggal atau tidak

tinggal di situ, itu karena kita tidak padankan dengan NIK 100 persen," ujar Pahala.

Sekarang, ujarnya, DTKS 98,9 persen padan dengan NIK. Artinya data DTKS orangnya ada di Indonesia dan belum meninggal, sehingga penyakit nomor satu sudah selesai.

Namun penyakit bansos nomor dua dan tiga itu penanganannya ada di tangan aparat di daerah. Berdasarkan DTKS terbaru per Juli 2023, ada 65,6 juta data penerima bansos yang dihapus karena penerima sudah meninggal dunia, tidak sinkron dengan data NIK dan data ganda.

Secara garis besar Pahala mengata-

kan perbaikan DTKS yang dilakukan seluruh instansi terkait yakni data 65,6 juta orang yang dihapus atau ditidurkan menurut istilah Kemensos, data perbaikan 40 juta orang, data orang miskin baru yang diusulkan pemerintah daerah (pemda) 13 juta orang, tidak layak menerima bansos 2,9 juta. Tidak hanya itu, penetapan atau pembaruan data bansos yang sebelumnya dilakukan enam bulan sekali kini menjadi sebulan sekali.

"Masyarakat juga bisa mengusulkan atau menyanggah penerima bantuan sosial melalui mekanisme usul sanggah secara daring di cekbansos.kemensos.go.id. Siapa saja mengusulkan boleh, mengusulkan diri sendiri boleh, tapi disanggah tetangga juga boleh dan itu mekanisme usul sanggah," kata Pahala, seraya menambahkan, seluruh instansi terkait akan terus melakukan perbaikan untuk memastikan bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. **(Ant/Has)-d**

NANA SUDJANA PIMPIN JATENG

Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi.

Pelantikan ini dikarenakan masa jabatan para gubernur tersebut berakhir pada Selasa (5/9). Mendagri Tito secara langsung mengambil sumpah sembilan Pj Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Para Pj Gubernur itu akan menjabat paling lama setahun dan bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Kesembilan Pj Gubernur itu terdiri dari Bey T Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah, Mayjen

TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali, Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua, Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur, Harrison Azroi sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat, Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Bachtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, pada Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo telah menunjuk 10 Pj Gubernur melalui Sidang Tim Penilai Akhir (TPA). Seorang Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat akan dilantik pada Selasa (19/9) karena masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru habis pada tanggal tersebut.

"Sebelum Saudara mengucapkan janji sebagai Pj Gubernur, bersedi-

akah Saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" tanya Mendagri saat melantik para Pj Gubernur tersebut. Para pejabat itu pun bersama-sama menjawab bersedia. "Bersedia!"

Tito lalu meminta mereka mengikuti kata-kata sumpah kepala daerah seperti yang diucapkannya. "Saya minta Saudara-Saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan setulus-tulusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara, dan bangsa," kata Tito. **(Ati)-d**

SINAU SEJARAH 'AMANAT 5 SEPTEMBER'

Yogya Melengkapi Indonesia Sebagai Sebuah Negara



Dialog Keistimewaan 'Bergabungnya Yogya dengan NKRI'.

YOGYA (KR) - Amanat 5 September 1945 bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba. Yogya secara tidak langsung sudah memfasilitasi kemerdekaan Indonesia sejak era gerakan nasional tahun 1908, di mana kongres pertama Budi Utomo digelar di Yogya. Begitu pula dengan Kongres Wanita tahun 1928.

Sedangkan secara langsung, Yogya mengirimkan putra-putra terbaiknya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakkar. Sedangkan dari Kraton Yogya ada Pangeran Purbaya dan Pangeran Bintoro. Mereka kemudian juga menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dengan demikian, ketika bangsa Indonesia (Sukarno-Hatta) memproklamkan kemerdekaan (17 Agustus 1945), hal tersebut sudah tidak mengagetkan bagi pemimpin Yogya (Sultan HB IX dan Paku Alam VIII), karena melalui tokoh-tokoh yang dikirimkan tersebut, pemimpin Yogya selalu memonitor segala perkembangan yang ada di Jakarta.

Demikian dijelaskan oleh Sejarawan UGM Bahauddin MHum dalam acara Sinau Sejarah Keistimewaan DIY bertema 'Amanat 5 September' yang diadakan Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Selasa (5/9) di SMA Negeri 7 Yogya, dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaisti-

mewan DIY. Kegiatan ini didanai dengan dana keistimewaan (danais).

Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Amanat 5 September' dimeriahkan Tari Sekar Pudyastuti oleh Nanda Afini dan Maria Angelia, musik akustik MasMis dengan personel Bronjong dan Bryan serta karawitan siswa SMA Negeri 7. Acara dimeriahkan bintang tamu Kwartet String Vord yang terdiri dari Danu Kusumawardhana (violin), Ido Brilliant (violin), Joshua Rezekiel (viola) dan Eki Satria (cello).

Selain itu juga pemutaran video dokumenter 'Amanat 5 September' dan Dialog Keistimewaan 'Bergabungnya Yogya dengan NKRI'. Selain Bahauddin, narasumber lainnya yaitu Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Hendro Muhaimin MA (Tenaga Ahli Parampara Praja dan Koordinator Bi-

dang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM), Tutik Sunarti SPd MPd (Kepala SMA Negeri 7) dengan moderator Wijil Rachmadani dan MC Gundhissos.

Pada kesempatan tersebut diberikan kenang-kenangan berupa buku keistimewaan DIY dari Paniradya Kaistimewan DIY. Buku diserahkan oleh Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi kepada Kepala SMA Negeri 7 Tutik Sunarti SPd MPd.

Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti Sinau Sejarah Keistimewaan DIY ini bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewan DIY dengan mengisi *form* di kolom *chat* di *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Menurut Bahauddin, setelah Proklamasi Kemerde-

kaan 17 Agustus, tidak menunggu lama, pada 18 Agustus sore, pemimpin Yogya (Sultan HB IX dan Paku Alam VIII) mengirim telegram ke Jakarta mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian ketika PPKI menetapkan Sukarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 19 Agustus, maka pada 20 Agustus, pemimpin Yogya mengirim telegram yang kedua ke Jakarta mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden dan siap berdiri di belakangnya.

Lalu, ketika di Jakarta, Presiden RI membentuk lembaga perwakilan yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat/KNIP (sekarang DPR RI) dan Badan Keamanan Rakyat/BKR (sekarang TNI), maka pemimpin Yogya juga membentuknya di Yogya. Puncaknya adalah Amanat 5 September 1945 yang berisi pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII yang menyatakan bahwa, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.

"Amanat 5 September 1945 ini menandakan simbol komitmen dari pemimpin Yogya (Sultan HB IX dan Paku Alam VIII) terhadap visi kebangsaan dan keindonesiaannya," kata Bahauddin.

Lebih lanjut dijelaskan Bahauddin, setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, ternyata ada dua aspek yang masih kosong untuk menjadi sebuah negara, yaitu belum ada wilayah dan rakyat. Karena sebelum 5 September 1945, belum ada wilayah bekas Hindia Belanda yang menyatakan diri sebagai wilayah RI. Kekosongan wilayah dan rakyat itulah yang kemudian diisi oleh Yogya yang menempatkan diri sebagai pelengkap RI, sehingga Amanat 5 September 1945 itu melengkapi Republik Indonesia sebagai sebuah negara.

"Jadi Indonesia sebagai bangsa diproklamkan 17 Agustus 1945, tapi Indonesia sebagai negara baru komplit itu sebenarnya pada 5 September 1945, yaitu ketika Yogya menyediakan rakyat dan wilayahnya sebagai bagian integral dari Indonesia," ujarnya.

Sedangkan Hendro Muhaimin menjelaskan tentang situasi sosial politik di Yogya, sebelum Indonesia merdeka. Menurutnya, dari berbagai literatur sejarah dijelaskan, bahwa saat pendudukan Belanda, situasi sosial politik di Yogya sudah sangat kondusif, karena Yogya saat itu sudah menjadi negara yang sangat otonom, sudah punya wilayah yang berdaulat, ada sistem pemerintahan dan ada pemimpinnya.

Menariknya lagi, kata Hendro, saat Belanda berhadapan dengan Kraton Yogya, posisi Yogya sama (egaliter) dengan Belanda, tidak ada yang merasa di atas atau di bawah, sehingga ada kontrak-kontrak politik yang mengkomodir kedua belah pihak, seperti ada Papatih Dalem yang di dalamnya ada urusan Nayaka yang keluar dan Nayaka yang ke dalam.

"Sistem pemerintahan di Kraton Yogya juga sangat dinamis, baik saat pendudukan Belanda maupun Jepang. Begitu pula ketika Indonesia merdeka, Yogya segera menyatakan bergabung dan tidak kesulitan menyesuaikan," katanya.

Menurut Hendro, ketika Indonesia memproklami-

kan kemerdekaannya, Sultan HB IX sudah mempersiapkan tidak mungkin Belanda tidak kembali untuk menjajah Indonesia. Dan terbukti, Belanda kembali untuk menjajah Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer II. Sebagai wilayah dengan situasi sosial politik yang mapan, Yogya pun siap melanjutkan pemerintahan RI.

"Jadi Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan hal yang dicita-citakan seluruh rakyat Yogya yang di dalamnya ada kasultanan dan kadipaten berikut sistem pemerintahan Yogya yang sudah berdaulat itu. Amanat 5 September 1945 juga tak ka-

Keistimewaan DIY ini. Dengan harapan, sejarah Yogya yang sangat luar biasa dan punya arti penting ini terus dilestarikan oleh generasi muda dan tidak hilang.

"Di Yogya ini ternyata pernah jadi tempat perencanaan kapal selam dan menjadi salah satu pioner Angkatan Udara, tetapi tidak ada penandanya, ini sangat disayangkan. Maka kita harus menjaga Kasultanan Yogya dan Kadipaten Pakualaman karena ada sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi istimewa karena ada dua lembaga tersebut," katanya.

Sementara itu, Tutik Sunarti menuturkan, minat sis-



Penyerahan kenang-kenangan buku keistimewaan DIY.

lah menarik, karena ada Dwitunggal RI (Sukarno-Hatta) dan Dwitunggal Istimewa (Sultan HB IX dan Paku Alam VIII) yang siap berdiri di belakang RI. Peristiwa bersejarah itu diliputi suasana kebatinan yang luar biasa, dan muaranya satu yaitu untuk kemerdekaan RI," katanya.

Aris Eko Nugroho mengatakan, Amanat 5 September 1945 membuktikan bahwa pemimpin Yogya yaitu Sultan HB IX dan Paku Alam VIII tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi untuk kepentingan yang luas yaitu bangsa dan negara. Aris berharap, para pelajar di Yogya mengetahui tentang sejarah Yogya dan melandani semangat perjuangan, patriotisme dan nasionalisme yang telah diconuhkan oleh para pemimpin Yogya.

Oleh karenanya, Paniradya Kaistimewan DIY bekerja sama dengan Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menggelar kegiatan Sinau Sejarah

wa SMA Negeri 7 mempelajari sejarah, termasuk sejarah keistimewaan DIY, sangat tinggi. Meskipun di kurikulum, materi tentang sejarah Yogya diberikan di kelas 11 (semester 2), namun sekolah menambahkannya dengan mengadakan diskusi tentang keistimewaan Yogya, salah satunya dengan mengulas video yang ditayangkan di YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Selain itu, sekolah mengadakan teatrikal perang-perangan agar siswa terlibat aktif dalam belajar sejarah dan metode pembelajaran lainnya, termasuk kegiatan Sinau Sejarah ini.

"Sejarah Keistimewaan Yogya tidak hanya sebatas bergabungnya Yogya ke RI, tapi sangat luas, terlebih setelah adanya Undang-Undang Keistimewaan DIY yang sangat perlu dipahami oleh siswa. Tantangan bagi guru-guru sejarah untuk berinovasi dan berkreasi dalam penyampaian materi," katanya. **(Wan/Dev)**



Tari Sekar Pudyastuti.



Musik akustik MasMis.



Karawitan SMA Negeri 7.



Penampilan Kwartet String Vord.